

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN KEUANGAN DIPA 04
Semester II

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2022

Jl. Sultan Trenggono No. 23
Kudus - Jawa Tengah 59516
Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014
e-mail : paKudus01@gmail.com

PENGADILAN AGAMA KUDUS

LAPORAN KEUANGAN DIPA 01

Semester II Tahun 2022

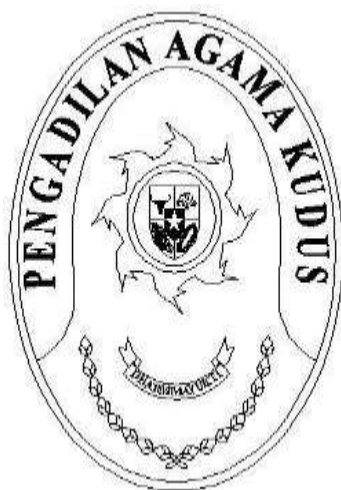
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2022

Jl. Raya Kudus – Pati Km. 04 Dersalam

Kudus – Jawa Tengah 59321

Telp. 0291-438385 Fax. 0291-438385

e-mail : infopakudus@yahoo.com



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA KUDUS
Semester II Tahun 2022

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

Telp. 0291-438385 Fax. 0291-438385

Kudus - Jawa Tengah 59321

e-mail : infopakudus@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Kudus adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Kudus. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kudus, 11 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran
PENGADILAN AGAMA KUDUS



Moh. Asfaroni, S.H.I

NIP. 197806182003121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus.....	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	4
A.5. Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai	15
B.3 Belanja Barang.....	15
B.4 Belanja Modal.....	16
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	17
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	17
B.4.3 Belanja Modal Jaringan	18

B.4.4 Belanja Modal Lainnya	18
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	19
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	19
C.2 Persediaan.....	20
C.3 Tanah.....	20
C.4 Peralatan dan Mesin.....	22
C.5 Gedung dan Bangunan.....	23
C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan	23
C.7 Aset Tetap Lainnya	23
C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	24
C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	24
C.10 Aset Tak Berwujud.....	25
C.11 Aset Lain-Lain	25
C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	26
C.13 Utang kepada Pihak Ketiga	26
C.14 Uang Muka dari KPPN	27
C.15 Ekuitas	28
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	28
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	28
D.2 Beban Pegawai	28
D.3 Beban Persediaan	29
D.4 Beban Barang dan Jasa	29
D.5. Beban Pemeliharaan	30
D.6 Beban Perjalanan Dinas	31
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	31
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	32
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	32

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	33
E.1 Ekuitas Awal	33
E.2 Defisit LO.....	33
E.3 Koreksi Nilai Persediaan	33
E.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap	33
E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	33
E.6 Koreksi Lain-lain	33
E.7 Transaksi Antar Entitas.....	34
E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	34
E.7.2 Transfer keluar	34
E.8 Ekuitas Akhir	34
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	35
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	35
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	35
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	35

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2022.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan TA 2021.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 .</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 13. Rincian Persediaan.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 14. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2022.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....</i>	<i>26</i>
<i>Tabel 17. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 18. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 19. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 21. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....</i>	<i>30</i>
<i>Tabel 22. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan & Amortisasi 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 24. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 25. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.....</i>	<i>32</i>

Pengadilan Agama Kudus

Jl. Raya Kudus – Pati Km. 04 Dersalam Kudus – Jawa Tengah 59321

Telp. 0291-438385 Fax. 0291-438385 e-mail : infopakudus@yahoo.com

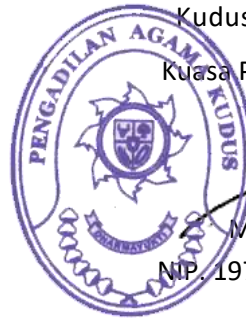
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester II Tahun 2022 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kudus, 11 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



Moh. Astaroni, S.H.I

NIP. 197806182003121002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester II Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.4.503.303,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp.0,00 atau mencapai 0,00 persen.

Realisasi Belanja Negara TA 2022 adalah sebesar Rp.4.583.597.116,00 atau mencapai 99,55 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.604.857.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp.18.622.823.014,00, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.3.668.800,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.18.619.154.214,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.1.560.508,00 dan Rp.18.621.262.506,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.200.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.4.524.767.262,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(4.523.567.262,00). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa

masing-masing sebesar Rp.3.303.303,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp. (4.520.263.959,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp.18.172.567.902,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp.(4.520.263.959,00), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp.0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.4.968.958.563,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.18.621.262.506,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022			31 Desember 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	0,00	4.503.303,00	0,00	0,00	1.200.021,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.021,00	0,00
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2.	3.176.207.000,00	3.155.732.423,00	99,37	3.539.532.000,00	3.470.197.843,00	98,18
2. Belanja Barang	B.3.	1.067.418.000,00	1.067.207.045,00	99,98	929.633.000,00	929.053.293,00	99,98
3. Belanja Modal	B.4.	361.232.000,00	360.657.648,00	99,84	37.500.000,00	37.497.900,00	99,99
Jumlah Belanja		4.604.857.000,00	4.583.597.116,00	99,55	4.506.665.000,00	4.436.749.036,00	93,44

NERACA

PENGADILAN AGAMA KUDUS
NERACA
PER 31 Desember 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		31 Desember 2022	31 DESEMBER 2021
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	-	-
Persediaan	C. 2	3.668.800	1.374.900
Jumlah Aset Lancar		3.668.800	1.374.900
Aset Tetap			
Tanah	C. 3	13.325.572.000	13.325.572.000
Peralatan dan Mesin	C. 4	2.694.020.583	1.954.688.185
Gedung dan Bangunan	C. 5	5.215.965.000	5.215.965.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 6	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 7	6.527.887	6.527.887
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 8	-	-
Akumulasi Penyusutan		(2.622.931.256)	(2.320.335.339)
Jumlah Aset Tetap		18.619.154.214	18.182.027.733
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 10	4.900.000	4.900.000
Aset Lain-lain	C. 11	16.328.800	5.918.800
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 12	(21.228.800)	(10.818.800)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		18.622.823.014	18.183.402.633
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 13	1.360.508	10.634.731
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 14	0	0
Pendapatan Diterima di Muka	C. 15	200.000	200.000
Uang Muka dari KPPN	C. 16	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.560.508	10.834.731
JUMLAH KEWAJIBAN		1.560.508	10.834.731
EKUITAS			
Ekuitas	C. 15	18.621.262.506	18.172.567.902
JUMLAH EKUITAS		18.621.262.506	18.172.567.902
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18.622.823.014	18.183.402.633

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN OPERASIONAL
31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		1.200.000	1.000.000
PENDAPATAN HIBAH		0	0
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	1.200.000	1.000.000
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	3.156.954.857	3.465.981.707
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	13.774.100	24.526.575
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	690.879.273	636.988.189
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	298.885.515	226.773.721
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	50.877.600	54.295.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	313.395.917	273.236.529
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	D. 8	0	0
JUMLAH BEBAN		4.524.767.262	4.681.801.721
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.523.567.262)	(4.680.801.721)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		3.303.303	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		3.303.303	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	21
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.303.303	21
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	(4.520.263.959)	(4.680.801.700)
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) LO		(4.520.263.959)	(4.680.801.700)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 Desember 2022 DAN 31 Desember 2021

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	18.172.567.902	18.409.441.203
SURPLUS/DEFISIT LO	E. 2	(4.520.263.959)	(4.680.801.700)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 4	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 5	-	-
Koreksi Lain-lain	E. 6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 7	4.968.958.563	4.443.928.399
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		448.694.604	(236.873.301)
EKUITAS AKHIR	E. 8	18.621.262.506	18.172.567.902

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar

Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022-2024 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Kudus Tahun 2015-2021 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2022-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.

yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Kudus sebagai Visi dan Misinya

Visi Pengadilan Agama Kudus : Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri Dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik.

Misi Pengadilan Agama Kudus :

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Kudus yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Meningkatkan SDM Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien, dan professional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan

Langkah Strategis

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Kudus melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Kudus. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan

operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrual

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Kudus menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Kudus dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Urusan Administrasi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.361.232.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan

Akuntansi atas

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Kudus telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) POK dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Semester II Tahun 2022	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	3.496.207.000	3.176.207.000
Belanja Barang	1.036.918.000	1.067.418.000
Belanja Modal	361.232.000	361.232.000
Jumlah Belanja	4.894.357.000	4.604.857.000

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp.4.503.303,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.4.503.303,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	31 Desember Tahun 2021		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3.303.303	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bngunan	0	1.200.000	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		0	4.503.303	0,00
Pengembalian		0	0	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		0	4.503.303	0,00

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2022 mengalami kenaikan Rp.3.303.282,- dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 terdapat pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin berupa lelang mobil ST 20 Nopol K188B sebesar Rp.3.303.303,00 dengan nomor risalah lelang dari KPKNL Nomor 794/37/2022 Tanggal 18 Agustus 2022, dengan bukti penerimaan Negara NTB 000000405595, NTPN 165678N3E1AP674N.

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2022 dan TA 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	TA. 2022	TA.2021	Kenaikan(Penurunan)	
				Rp	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21	(21,00)	(100,00)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.303.303	0	3.303.303	100,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bngunan	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		4.503.303	1.200.021	3.303.282	73,35

Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Kudus pada periode 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.4.583.597.116,00 atau 99,55% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.496.207.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2022 tersaji sebagai berikut:

Realisasi Belanja
Negara Rp.
4.583.597.116,00.

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	3.496.207.000	3.155.732.423	99,37
52	Belanja Barang	1.036.918.000	1.067.207.045	99,98
53	Belanja Modal	361.232.000	360.657.648	99,84
Jumlah Belanja Bruto		4.604.857.000	4.583.597.116	99,55
Pengembalian Belanja		0	0	
Jumlah Belanja Netto		4.604.857.000	4.583.597.116	99,55

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.76.932.116,00 atau sebesar 1,68% dibandingkan dengan realisasi tahun yang lalu pada periode yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya realisasi belanja modal berupa pengadaan Mobil dinas roda 4 dan motor dinas roda 2 serta peningkatan pelaksanaan pemeliharaan kantor pada Pengadilan Agama Kudus.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	3.155.732.423	3.539.532.000	(383.799.577)	(12,16)
52	Belanja Barang	1.067.207.045	929.633.000	137.574.045	12,89
53	Belanja Modal	360.657.648	37.500.000	323.157.648	89,60
Jumlah Belanja Netto		4.583.597.116	4.506.665.000	76.932.116	1,68

B.2 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.3.155.732.423,
00

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.3.155.732.423,00 dan Rp.3.470.197.843,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp.314.465.420,00 atau (9,96)% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan adanya mutasi masuk pegawai.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.339.836.680	1.334.119.000	5.717.680	0,43
Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.245	18.916	1.329	6,56
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	98.967.216	96.952.660	2.014.556	2,04
Belanj Tunj.Anak PNS	27.716.801	25.247.516	2.469.285	8,91
Belanja Tunj.Struktural PNS	36.400.000	33.900.000	2.500.000	6,87
Belanja Tunj.Fungsional PNS	1.182.110.000	1.487.570.000	(305.460.000)	(25,84)
Belanj Tunj.PPh PNS	139.377.987	183.557.819	(44.179.832)	(31,70)
Belanja Tunj.Beras PNS	75.823.740	68.799.000	7.024.740	9,26
Belanja Uang Makan PNS	235.240.000	227.588.000	7.652.000	3,25
Belanja Tunj.Umum PNS	20.610.000	12.445.000	8.165.000	39,62
Realisasi Belanja Bruto	3.156.102.669	3.470.197.991	(314.095.242)	(9,95)
Pengembalian	(370.246)	(148)	(370.098)	99,96
Realisasi Belanja Netto	3.155.732.423	3.470.197.843	(314.465.420)	(9,96)

B.3 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.1.067.418.000,00

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.067.418.000,00 dan Rp.929.053.293,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp.138.153.752,00 atau 12,95% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena pada bulan November mendapat tambahan anggaran daya jasa dan sewa rumah dinas hakim serta meningkatnya realisasi anggaran pemeliharaan pada tahun anggaran 2022.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	544.100.698	499.473.110	44.627.588	8,20
Belanja Barang Non Operasional	0	4.625.000	(4.625.000)	(100,00)
Belanja Barang persediaan	16.068.000	14.891.000	1.177.000	7,33
Belanja Jasa	157.275.232	128.995.462	28.279.770	17,98
Belanja Pemeliharaan	298.885.515	226.773.721	72.111.794	24,13
Belanja Perjalanan Dinas	50.877.600	54.295.000	(3.417.400)	(6,72)
Realisasi Belanja Bruto	1.067.207.045	929.053.293	138.153.752	12,95
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	1.067.207.045	929.053.293	138.153.752	12,95

B.4 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp.360.657.648,00

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.360.657.648,00 dan Rp. 37.497.900,00. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp.323.159.748,00 atau 89,60% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 anggaran belanja modal meningkat di banding tahun 2021, yaitu dengan adanya Pengadaan Melanja Modal Kendaraan Dinas roda 4 dan Kendaraan dinas roda 2 yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2022.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.657.648	37.497.900	323.159.748	89,60
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	360.657.648	37.497.900	323.159.748	89,60

Pengembalian	0	0	0	0
Realisasi Belanja Netto	360.657.648	37.497.900	323.159.748	89,60

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.360.657.648,00 dan Rp.37.497.900,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 anggaran belanja modal meningkat di banding tahun 2021, yaitu dengan adanya Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Dinas roda 4 dan Kendaraan dinas roda 2 yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2022. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	360.657.648	37.497.900	323.159.748	89,60
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengadaan	0	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	360.657.648	37.497.900	323.159.748	89,60
Pengembalian	0	0	0	0
Realisasi Belanja Netto	360.657.648	37.497.900	323.159.748	89,60

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0	-

Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	-
Pengembalian	0	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	-

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	-
Pengembalian	0	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	-

B.4.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	-
Pengembalian	0	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp.0,00 atau 100,00%. Hal ini dikarenakan Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 telah dipertanggungjawabkan seluruhnya melalui mekanisme SP2D Nihil dengan nomor 211291701000385 tanggal 29 Desember 2022 dan SSBP pengembalian sisa UP dengan Nomor NTPN B79970N9V97G8BR4 tanggal 29 Desember 2022. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 12.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember TA 2021
1.	Uang Persediaan per 31 Desember 2022	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Kudus per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Kuitansi yang belum di GU kan	0
2	Uang Tunai di Brankas	00
3	Uang di Rekening Bank	-
	Total	0
	Pajak	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0

Persediaan

Rp.3.668.800,00

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.3.668.800,00 dan Rp.1.374.900,00, terjadi kenaikan sebesar Rp.2.293.900,00 atau 166,84 %.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Rincian Persediaan*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	31 Desember 2021	Mutasi	31 Desember 2022
1	Barang Konsumsi	1.374.900	2.293.900	3.668.800
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah		1.374.900	2.293.900	3.668.800

Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik Persediaan sesuai Berita Acara opname Fisik No. W11-A16/ 3362 /KU.00/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022

C.3 Tanah**Tanah**

Rp13.325.572.000,00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Badan Urusan Administrasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.13.325.572.000,00 dan Rp.13.325.572.000,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	13.325.572.000
Mutasi Tambah :	-
Mutasi Kurang :	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2022	13.325.572.000

Tabel 14. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2022

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Nomor 005, Tanggal 21 Juli 2009	Jl. Raya Kudus-Pati Km.04 Dersalam Kudus 59321	Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI	3.172	Rp 4.071.450.000

C.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp.2.694.020.5
83,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.2.694.020.583,00 dan Rp.1.954.688.185,00, terjadi kenaikan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp.739.722.398,00 karena pada periode Semester I tahun 2022 terdapat realisasi penambahan aset peralatan dan mesin berupa pembelian 3 unit PC kepaniteraaran 2 unit printer, 1 unit mobil Mitsubishi xpander dan transfer masuk dari mahkamah agung berupa seperangkat Alat Pengolah Data Ruang Sidang Elektronik, dengan nomor Berita Acara Serah Terima BMN Nomor 085/BUA.7/BAST/BMN-SE/8/2022, tanggal 15 Agustus 2022 sejumlah Rp.209.350.900,-, dan 5 buah lap top axio dengan Nomor 611/BUA.7/BAST/BMN-LP/10/2022, tanggal 1 November 2022 sejumlah Rp.59.960.000,-, serta 1 buah server dan 2 buah scanner dengan nomor Berita Acara Serah Terima BMN Nomor 613/BUA.7/BAST/BMN.SS/12/2022, tanggal 16 Desember 2022 sejumlah Rp.124.400.000,-. Dengan nilai total transfermasuk sebesar Rp.393.710.900,- dan yang masuk dalam ekstrakomtabel sebesar Rp.3.864.150,- yaitu 7 untit microphone Hardwell dengan harga per item @Rp,549.450,-

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	1.954.688.185
Pembelian	360.657.648
Pengembangan Nilai Aset	-
Reklasifikasi Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Transfer Masuk	389.846.750
Jumlah Mutasi Tambah	739.722.398
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 31 Desember 2022	2.706.547.533
Akumulasi Penyusutan	2.005.672.931
Nilai Buku	700.874.602

Gedung dan
Bangunan
Rp.5.215.965.0
00,00

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.5.215.965.000,00 dan Rp.5.215.965.000,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	5.215.965.000
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 31 Desember 2022	5.215.965.000
Akumulasi Penyusutan	626.323.740
Nilai Buku	4.589.641.260

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp.0,00

C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	0
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	0

Aset Tetap
Lainnya
Rp.6.527.887,00

C.7 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.6.527.887,00 dan Rp.6.527.887,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	6.527.887
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 31 Desember 2022	6.527.887
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	0

C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kudus yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	0
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	0

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.(2.622.931.256,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp(2.622.931.256,00) dan Rp.(2.320.335.339,00), terjadi kenaikan sebesar (Rp.302.595.917,00) atau 13,04%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.706.547.533	(2.005.672.931)	700.874.602
2	Gedung dan Bangunan	5.215.965.000	(626323.740)	4.589.641.260
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	6.527.887	-	6.527.887
Jumlah		7.929.040.420	(2.631.996.671)	5.297.043.749

C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.4.900.000,00 dan Rp.4.900.000,00.

Aset Tak Berwujud
Rp.4.900.000,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Badan Urusan Administrasi berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	4.900.000
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 31 Desember 2022	4.900.000
Akumulasi Penyusutan	4.900.000
Nilai Buku	0

C.11 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.16.328.800,00 dan Rp.5.918.800,00, terjadi kenaikan nilai aset lain-lain per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, dikarenakan terdapat penambahan aset yang rusak berat berupa 1 buah kendaraan dinas roda 4 suzuki carry, dalam proses penjualan.

Aset Lain-Lain
Rp.16.328.800,00
0

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Kudus serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	5.918.800
Jumlah Mutasi Tambah	10.410.000
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-

Saldo Per 31 Desember 2022	16.328.800
Akumulasi Penyusutan	16.328.800
Nilai Buku	0

C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp.(21.228.800,00) dan Rp.(10.818.800,00), terjadi kenaikan sebesar Rp.10.710.000,- atau 98,99%.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2022 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
 (dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	4.900.000	(4.900.000)	0
2	Aset Lain-lain	17.224.300	(17.224.300)	0
Jumlah		21.228.800	(21.228.800)	0

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga
 Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.1.360.508,00 dan Rp.10.634.731,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang masih harus di bayar	1.222.434	Kekurangan Gaji Pegawai 2022 sejumlah 4 orang
2	Belanja Barang yang masih harus di bayar	138.074	Langganan Telpon Pemakaian Desember 2022
Jumlah		1.360.508	

Pendapatan
diterima
dimuka
Rp.200.000
,00

C.14 Pendapatan di Terima di Muka

Pendapatan di terima dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.200.000,00 dan Rp0,00.

Pendapatan di terima di muka merupakan Pendapatan yang sesungguhnya belum merupakan pendapatan pada periode yang bersangkutan, tetapi pembayarannya sudah terlebih dahulu diterima. Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2021 terdapat pendapatan Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan sebesar Rp.1.200.000,00 berupa sewa kantin dengan nomor persetujuan dari KPKNL Nomor S.34/MK.6/WKN.09/KNL.01/2021 Tanggal 10 Februari 2021, dan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 201/SEK/SK/III/2021 Tanggal 3 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Pengadilan Agama Kudus, serta Perjanjian sewa BMN antara Pengadilan Agama Kudus Kelas IB dengan Penyewa Kantin dengan nomor W11-A16/756/PL.02/III/2021 tanggal 09 Maret 2021. Oleh karena dalam bulan berjalan pada tahun 2021, sewa mulai dari bulan Maret 2021 maka dari total pendapatan yang di terima Rp,1.200.000,- dengan akumulasi 12 bulan, masih terdapat pendapatan di terima dimuka sejumlah Rp.200.000,-

No	Uraian	Nilai Sewa	Jangka Waktu (Bulan)	TMT	Jatuh Tempo	Daluwarsa Tahun Berjalan	Pendapatan Diterima Dimuka
1	Lama sewa 3 tahun dengan pembayaran pertahun	1.200.000	12	09 Maret 2022	09 Maret 2023	1.000.000	200.000
JUMLAH		1.200.000					200.000

Uang muka dari
KPPN Rp.0
,00

C.15 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN pada tahun 2022

dibagi atas dua macam, yaitu Uang Persediaan (UP) berupa uang tunai pada kas bendahara pengeluaran dan Uang Persediaan (UP) berupa Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Ekuitas

Rp.18.621.262.

506,00

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.18.621.262.506,00 dan Rp.18.172.567.902,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan PNPB
Rp.1.200.000,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.200.000,00 dan Rp.0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 17. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
Pendapatan PNPB Lainnya				
Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	1.200.000	1.000.000	100
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		1.200.000	1.000.000	100
Pendapatan Lain-lain				
1	Pendapatan Denda Keterlambatan	0	0	0
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah Pendapatan Lain-lain		0	0	0
Total		1.200.000	1.000.000	100

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp.3.156.954.857,00

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.3.156.954.857,00 dan Rp.3.465.981.707,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 18. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)
				%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.340.823.780	1.333.534.680	0,54
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.367	18.768	7,85
3	Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	99.050.546	96.894.220	2,18
4	Belanj Tunj.Anak PNS	27.748.683	25.224.140	9,10
5	Belanja Tunj.Struktural PNS	36.400.000	33.900.000	16,35
6	Belanja Tunj.Fungsional PNS	1.182.230.000	1.484.570.000	(25,57)
7	Belanj Tunj.PPh PNS	139.377.987	183.007.899	(31,30)
8	Belanja Tunj.Beras PNS	75.823.740	68.799.000	9,26
9	Belanja Uang Makan PNS	235.240.000	227.588.000	3,25
10	Belanja Tunj.Umum PNS	20.610.000	12.445.000	39,62
Total		3.157.325.103	3.465.981.707	(9,78)
Pengembalian		(370.246)	0	(100)
Netto		3.156.954.857	2.724.619.202	(9,78)

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp.13.774.100,00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.13.774.100,00 dan Rp.24.526.575,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 19. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)
				%
1	Beban Persediaan Konsumsi	13.774.100	24.526.575	(43,84)
2	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		13.774.100	24.526.575	(43,84)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp.690.879.273,00

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.690.879.273,00 dan Rp.636.988.189,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	441.582.500	392.811.400	11,04
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	167.800	707.700	(321,75)
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	34.900.000	37.700.000	(8,02)
4	Beban Barang Operasional Lainnya	65.893.732	66.131.376	(0,36)
5	Beban Bahan	0	3.327.300	0
6	Beban Langganan Listrik	105.984.519	94.854.640	10,50
7	Beban Langganan Telepon	1.686.722	1.730.773	(2,61)
8	Beban Sewa	35.700.000	35.100.000	1,68
9	Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	4.964.000	4.625.000	6,83
Total		690.879.273	636.988.189	7,80

Beban

Pemeliharaan

Rp.298.885.515,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.298.885.515,00 dan Rp.226.773.721,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Terdapat kesalahan penginputan akun persediaan suku cadang yang seharusnya akun barang konsumsi, belum dilaksanakan reklas sebesar Rp.480.000,-.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	196.992.600	159.975.000	18,79
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.892.915	67.004.221	34,24
Total		298.885.515	226.773.721	24,13

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.50.877.600,00

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.50.877.600,00 dan Rp.26.480.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	49.777.600	52.975.000	(6,42)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.100.000	1320.000	(20,00)
Total		50.877.600	54.295.000	(6,72)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.313.395.917,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.313.395.917,00 dan Rp.136.618.266,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	188.131.169	147.971.781	21,35
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	125.264.748	125.264.748	0,00
Jumlah Penyusutan		313.395.917	273.236.529	12,81
3	Beban Amortisasi Software	0	0	0,00
Jumlah Amortisasi		0	0	0
Total		313.395.917	273.236.529	12,81

0

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0,00

Tabel 24. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNBK	0	0	0
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	0
3	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian lancar Tagihan TP/TGR	0	0	0
4	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0
Total		0	0	0

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.3.303.3030,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik (Turun) %
1	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	21	(100,00)
2	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	3.303.303	0	100,00
Total		3.303.303	21	100,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.18.172.567.902,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.18.172.567.902,00 dan Rp. 18.409.441.203,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO
Rp(4.520.263.959,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp.(4.520.263.959,00) dan Rp.(4.680.801.700,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp.0,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

E.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp.0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Rp.0,00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain
Rp.0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Koreksi ini merupakan koreksi atas jurnal balik akrual yang telah dibuat per 31 Desember 2021, berupa Temuan BPK RI Tahun 2021 yang belum selesai di Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Temuan BPK RI Tahun 2021	0
Total		0

E.7 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp.4.968.958.563,00

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.4.968.958.563,00 dan Rp.4.443.928.399,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.583.597.116
Diterima dari Entitas Lain	(4.503.303)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	389.864.750
Pengesahan Hibah Langsung	0
	4.968.958.563

E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp.(4.503.303,00) sedangkan DKEL sebesar Rp.4.583.597.116,00.

E.7.2 Transfer keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00.

E.8 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp.18.621.262.506,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.18.621.262.506,00 dan Rp. 18.172.567.902,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2022 pada Pengadilan Agama Kudus yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2022.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat hasil audit BPK yang harus ditindak lanjuti Pengadilan Agama Kudus per 31 Desember tahun 2022.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Terdapat rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kudus

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Kudus adalah:

Rekening Bendahara pengeluaran pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Kudus A/C 653244009731000 a.n. BPG 129 PENGADILAN AGAMA KUDUS 400973 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0.

Surat ijin penerbitan persetujuan kembali rekening virtual oleh Kepala KPPN Kudus Nomor 000029 tanggal 30 April 2021, setelah rekening giro yang sebelumnya di tutup sesuai dengan tahapan restrukturisasi rekening Pemerintah mengikuti PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga serta surat dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Nomor S-762/PB.3/2022 tanggal 21 April 2021 tentang Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening Lingkup Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

2. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2022 bernomor : DIPA-005.01-2.400973/2022 tanggal 23 November 2021 berjumlah sebesar Rp.4.604.857.000,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Awal

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.02		
1066.EBA	522192	5.000.000,00
005.01.WA		
1066.EAA	511111	1.369.833.000,00
	511119	23.000,00
	511121	136.985.000,00
	511122	27.395.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.373.110.000,00
	511125	274.535.000,00
	511126	63.411.000,00
	511129	202.620.000,00
	511151	11.895.000,00
	521111	252.375.000,00
	521119	26.913.000,00
	521811	21.000.000,00
	521111	174.000.000,00
	521114	2.400.000,00
	522111	100.800.000,00
	522112	6.000.000,00
	522113	4.503.303,00
	522141	3.600.000,00
	523111	197.220.000,00
	523121	96.270.000,00
	521115	41.200.000,00
	521111	18.750.000,00
	521119	3.150.000,00
	521119	2.500.000,00
	524111	45.800.000,00
	524111	7.680.000,00
	524113	1.760.000,00
	521131	2.500.000,00
	522192	5.000.000,00
	521141	21.600.000,00
005.01.02		
1071.EAD	532111	310.732.000,00
	532111	50.500.000,00
Total		<u>4.604.857.000,00</u>

- b. Revisi DIPA 1 (Tanggal 19 April 2022)
Tidak terdapat perubahan nilai pagu anggaran pada Revisi DIPA 1, karena merupakan pengesahan revisi POK dan revisi halaman III DIPA.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.02		
1066.EBA	522192	5.000.000,00
005.01.WA		
1066.EAA	511111	1.369.833.000,00
	511119	23.000,00
	511121	136.985.000,00
	511122	27.395.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.373.110.000,00
	511125	274.535.000,00
	511126	63.411.000,00
	511129	202.620.000,00
	511151	11.895.000,00
	521111	252.375.000,00
	521119	41.901.000,00
	521811	17.000.000,00
	521111	171.000.000,00
	521114	2.400.000,00
	522111	100.800.000,00
	522112	6.000.000,00
	522113	12.000,00
	522141	3.300.000,00
	523111	197.220.000,00
	523121	96.270.000,00
	521115	34.900.000,00
	521111	18.750.000,00
	521119	3.150.000,00
	521119	2.500.000,00
	524111	45.800.000,00
	524111	7.680.000,00
	524113	1.760.000,00
	521131	2.500.000,00
	522192	5.000.000,00
	521141	21.600.000,00
005.01.02		
1071.EAD	532111	310.732.000,00

	532111	50.500.000,00
Total		<u>4.604.857.000,00</u>

c. Revisi DIPA 2 (Tanggal 12 Juli 2022)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu anggaran pada Revisi DIPA 2, karena merupakan pengesahan revisi POK dan revisi halaman III DIPA.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.02		
1066.EBA	522192	5.000.000,00
005.01.WA		
1066.EAA	511111	1.369.833.000,00
	511119	23.000,00
	511121	136.985.000,00
	511122	27.395.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.373.110.000,00
	511125	274.535.000,00
	511126	63.411.000,00
	511129	202.620.000,00
	511151	11.895.000,00
	521111	252.375.000,00
	521119	52.901.000,00
	521811	20.000.000,00
	521111	171.000.000,00
	521114	600.000,00
	522111	100.800.000,00
	522112	1.200.000,00
	522113	12.000,00
	522141	3.300.000,00
	523111	197.220.000,00
	523121	96.870.000,00
	521115	34.900.000,00
	521111	18.750.000,00
	521119	3.150.000,00
	521119	2.500.000,00
	524111	45.800.000,00
	524111	7.680.000,00
	524113	1.760.000,00
	521131	2.500.000,00
	522192	1.000.000,00
	521141	21.600.000,00

005.01.02		
1071.EAD	532111	310.732.000,00
	532111	50.500.000,00
Total		<u>4.604.857.000,00</u>

d. Revisi DIPA 3 (Tanggal 6 September 2022)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu anggaran pada Revisi DIPA 3, karena merupakan pengesahan revisi POK dan revisi halaman III DIPA.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.02		
1066.EBA	522192	5.000.000,00
005.01.WA		
1066.EAA	511111	1.369.833.000,00
	511119	23.000,00
	511121	136.985.000,00
	511122	27.395.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.373.110.000,00
	511125	274.535.000,00
	511126	63.411.000,00
	511129	202.620.000,00
	511151	11.895.000,00
	521111	252.375.000,00
	521119	60.870.000,00
	521811	20.047.000,00
	521111	171.000.000,00
	521114	600.000,00
	522111	100.800.000,00
	522112	1.944.000,00
	522113	12.000,00
	522141	3.300.000,00
	523111	196.835.000,00
	523121	92.370.000,00
	521115	34.900.000,00
	521111	18.750.000,00
	521119	3.045.000,00
	521119	2.500.000,00
	524111	45.800.000,00
	524111	3.400.000,00
	524113	770.000,00
	521131	500.000,00

	522192	500.000,00
	521141	21.600.000,00
005.01.02		
1071.EAD	532111	310.732.000,00
	532111	50.500.000,00
	Total	<u>4.604.857.000,00</u>

e. Revisi DIPA 4 (Tanggal 8 November 2022)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu anggaran pada Revisi DIPA 3, karena merupakan pengesahan revisi POK dan revisi halaman III DIPA.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.02		
1066.EBA	522192	5.000.000,00
005.01.WA		
1066.EAA	511111	1.369.833.000,00
	511119	23.000,00
	511121	136.985.000,00
	511122	28.581.000,00
	511123	36.940.000,00
	511124	1.434.605.000,00
	511125	155.503.000,00
	511126	76.911.000,00
	511129	235.856.000,00
	511151	20.970.000,00
	521111	252.915.000,00
	521119	60.870.000,00
	521811	16.068.000,00
	521111	171.000.000,00
	521114	192.000,00
	522111	105.024.000,00
	522112	1.944.000,00
	522113	12.000,00
	522141	3.300.000,00
	523111	196.835.000,00
	523121	92.370.000,00
	521115	34.900.000,00
	521111	18.750.000,00
	521119	3.360.000,00
	521119	2.500.000,00
	524111	47.868.000,00

	524111	1.485.000,00
	524113	1.100.000,00
	521131	10.000,00
	522192	10.000,00
	521141	32.400.000,00
005.01.02		
1071.EAD	532111	310.732.000,00
	532111	50.500.000,00
	Total	<u>4.905.357.000,00</u>

f. Revisi DIPA 5 (Tanggal 28 Desember 2022)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu anggaran pada Revisi DIPA 3, karena merupakan pengesahan revisi POK.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.02		
1066.EBA	522192	5.000.000,00
005.01.WA		
1066.EAA	511111	1.344.403.000,00
	511119	23.000,00
	511121	99.100.000,00
	511122	28.681.000,00
	511123	36.940.000,00
	511124	1.182.236.000,00
	511125	148.087.000,00
	511126	76.911.000,00
	511129	235.856.000,00
	511151	23.970.000,00
	521111	252.477.000,00
	521119	60.870.000,00
	521811	16.070.000,00
	521111	171.000.000,00
	521114	192.000,00
	522111	114.876.000,00
	522112	1.740.000,00
	522113	12.000,00
	522141	3.300.000,00
	523111	197.043.000,00
	523121	101.915.000,00
	521115	34.900.000,00
	521111	18.750.000,00
	521119	4.870.000,00

	521119	1.080.000,00
	524111	48.318.000,00
	524111	1.485.000,00
	524113	1.100.000,00
	521131	10.000,00
	522192	10.000,00
	521141	32.400.000,00
005.01.02		
1071.EAD	532111	310.732.000,00
	532111	50.500.000,00
	Total	<u>4.905.357.000,00</u>

3. Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum aplikasi SAIBA 2022.
 - a. Jurnal Penyesuaian
 - Pada tanggal 30 Desember 2022 penyajian jurnal akrual Tahun Anggaran 2022.

4. Perbaikan Transaksi SPM/SP2D/SSPB/SSBP

Terdapat perbaikan transaksi SSPB (Surat Setoran Bukan Pajak) pada tanggal 06 September 2022 Nomor W11-A16/2212/KU.04/IX/2022 tentang Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. Yang berasal dari transaksi hasil Penjualan BMN berupa station wagon (Mobil ST 20). Yaitu adanya kesalahan kode satker, yang seharusnya masuk kode satker 400973 (DIPA 01) tetapi masuk kedalam kode satker 400974 (DIPA 04) serta perubahan akun dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425122) menjadi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122). Dengan total transaksi Rp.3.303.303,00. Telah di tindak lanjuti dengan terbitnya surat dari KPPN Kudus Nomor S-339/KPN.1405/2022 tanggal 06 September 2022 tentang Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.

5. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Petikan Keputusan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Nomor W11-A16/24/KU.01/I/2022 tanggal 04 Januari

2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan Saiba dan Staf Pengelola Keuangan Simak-BMN, dan telah dirubah karena adanya mutasi Pejabat Pengelola DIPA dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kudus Nomor W11-A16/675/KU.01/III/2022 tanggal 01 Maret 2022. Maka Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan Saiba/PPABP dan Staf Pengelola Keuangan Simak-BMN Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Moh. Asfaroni, SHI.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Moh. Asfaroni, SHI.
Pejabat Penandatanganan SPM	:	Umardhani,SHI.
Bendahara Pengeluaran	:	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.
Staf Keuangan-Operator SAIBA / PPABP	:	Agus Fatchurrochim Thoyib.
Staf Keuangan-Operator SAIBA /SIMAK-BMN	:	Indah Fatmawati, SE.

LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN SEMESTER II TA. 2022

KODE	URAIAN	MM	KUAN TITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN PER 31 Desember 2022	NILAI BUKU PER 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	9	10
131111	Tanah		3.172	13.325.572.000	0	13.325.572.000
2.01.01	TANAH PERSIL	1	3.172	13.325.572.000	0	13.325.572.000
132111	PERALATAN DAN MESIN		707	2.706.547.533	2.005.672.931	700.874.602
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	7	530.315.976	262.383.875	267.932.101
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	7	1	140.000	140.000	0
3.03.03	ALAT UKUR	5	3	9.500.000	9.500.000	0
3.05.01	ALAT KANTOR	5	120	259.230.400	259.545.400	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	449	690.210.206	647.246.213	42.963.993
3.06.01	ALAT STUDIO	5	7	76.285.820	24.931.382	51.354.438
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5	9	6.928.300	6.928.300	0
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10	1	99.500.000	99.500.000	0
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	1	10.843.050	5.421.525	5.421.525
3.10.01	KOMPUTER UNIT	4	74	773.684.283	556.831.738	216.852.545
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	31	249.594.498	133.244.498	116.350.000
135121	ASET TETAP LAINNYA		64	6.527.887	0	6.527.887
4.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	64	64	6.527.887	0	6.527.887
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		4	5.215.965.000	626.323.740	4.589.641.260
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	3	4.973.086.000	597.749.740	4.375.336.260
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	50	1	242.879.000	28.574.000	214.305.000
	SOFTWARE		1	4.900.000	4.900.000	0

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KUDUS TRIWULAN III TAHUN 2022

	ASET TAK BERWUJUD		1	4.900.000	4.900.000	0
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		54	17.224.300	17.224.300	0
3.02.01	ALAT NAGKUTAN DARAT BERMOTOR	1	1	10.800.000	10.800.000	0
3.05.01	ALAT KANTOR	5	17	2.392.800	2.392.800	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	35	3.619.600	3.619.600	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	4	1	411.900	411.900	0
TOTAL				21.276.736.720	2.654.120.971	18.622.615.749

LAMPIRAN A.2
TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
SEMESTER II TA. 2022

No	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	No. KDP	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp) Murni/Pinjaman	Uang Muka	Retensi	Keterangan		
														Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
2.																

LAMPIRAN A.2**HIBAH**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA JASA
PER 31 DESEMBER 2017**

No	Nama Pemberi	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1	Judicial Sector Support Program (JSSP) - Belanda	Jasa	LN	Rp 253.096.409	Rp 253.096.409	-	-
2	UE-UNDP	Jasa	LN	Rp 17.024.831.231	Rp 17.024.831.231	-	-